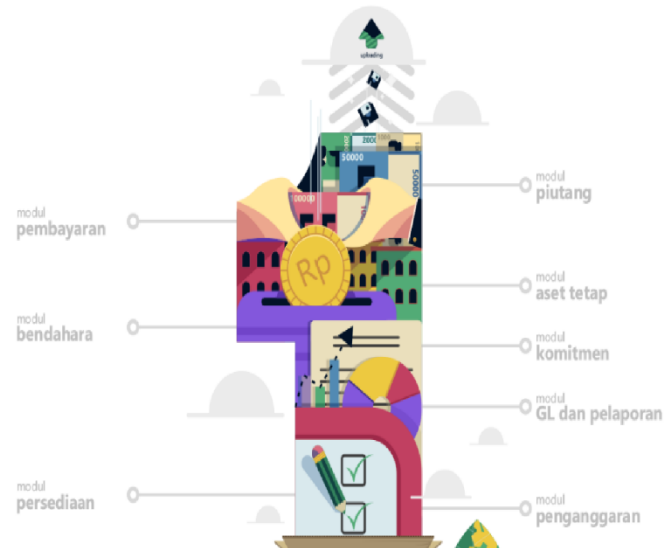




BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Selamat datang di

Aplikasi SAKTI



saikti | Build 15 Juli 2022 23:26:51 GMT+7

SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Jalan Laksamana Malahayati Km. 26 Aceh Besar

Telp. 0651-31363, Fax. 0651-31346

Email : supmladong@yahoo.com; 03212.427551kd@gmail.com

Website : supmladong.kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

SUPM Negeri Ladong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan SUPM Negeri Ladong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada SUPM Negeri Ladong. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Aceh Besar, 13 Januari 2025

Kepala,

Harun, S.Pi., M.Si

NIP 196811101999031003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	Ii
Pernyataan Tanggung Jawab	Iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	40
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	46
F. Penjelasan atas Laporan Realisasi Rincian Output	46
G. Pengungkapan Penting Lainnya	49
VI. Lampiran dan Daftar	51



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG

JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI KM. 26 ACEH BESAR TELEPON: (0651) 31363,
FAKSIMILE: (0651) 31346, 7483771, SURAT ELEKTRONIK supmladong@yahoo.com
[website: supmladong.kkp.go.id](http://website:supmladong.kkp.go.id) KOTAK POS 132 BANDA ACEH – 23001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SUPM Negeri Ladong yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Aceh Besar, 13 Januari 2024

Kepala,



Harun, S.Pi., M.Si

NIP 196811101999031003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SUPM Negeri Ladong Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp154.129.410,00 atau mencapai 146,28 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp105.364.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp13.048.987.580,00 atau mencapai 99,25 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp13.148.075.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp36.785.650.483,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp12.923.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp36.672.792.483,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp99.935.000,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp123.240.083,00 dan Rp36.662.410.400,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp143.075.667,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp14.240.719.877,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp14.097.644.210,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp11.053.743,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp14.086.590.467,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp37.854.142.697,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp14.086.590.467,00 dikurangi koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp12.894.858.170,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp36.662.410.400,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk TA 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SUPM NEGERI LADONG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024		% thd Angg	31 DESEMBER 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	105.364.000	154.129.410	146,28	207.189.703
JUMLAH PENDAPATAN		105.364.000	154.129.410	146,28	207.189.703
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	8.214.889.000	8.126.131.182	98,92	8.949.129.005
Belanja Barang	B.4	4.466.512.000	4.456.612.398	99,78	6.315.495.659
Belanja Modal	B.5	466.674.000	466.244.000	99,91	45.171.000
JUMLAH BELANJA		13.148.075.000	13.048.987.580	99,25	15.309.795.664

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

SUPM NEGERI LADONG NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.3	-	11.053.740
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.4	-	(55.269)
Persediaan	C.5	12.923.000	17.738.000
Jumlah Aset Lancar		12.923.000	28.736.471
ASET TETAP			
Tanah	C.6	14.720.155.000	14.720.155.000
Peralatan dan Mesin	C.7	14.616.362.341	14.048.938.341
Gedung dan Bangunan	C.8	24.587.232.834	24.187.662.834
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.9	2.746.388.770	2.746.388.770
Aset Tetap Lainnya	C.10	652.890.826	652.890.826
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	(20.650.237.288)	(18.507.843.308)
Jumlah Aset Tetap		36.672.792.483	37.848.192.463
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.12	5.098.130	5.098.130
Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	C.12	99.935.000	-
Aset Lain-Lain	C.14	409.160.800	885.410.800
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.15	(414.258.930)	(890.508.930)
Jumlah Aset Lainnya		99.935.000	-
JUMLAH ASET		36.785.650.483	37.876.928.934
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	123.240.083	22.786.237
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		123.240.083	22.786.237
JUMLAH KEWAJIBAN		123.240.083	22.786.237
EKUITAS			
Ekuitas	C.17	36.662.410.400	37.854.142.697
JUMLAH EKUITAS		36.662.410.400	37.854.142.697
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		36.785.650.483	37.876.928.934

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

SUPM NEGERI LADONG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	143.075.667	154.323.736
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		143.075.667	154.323.736
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	8.137.184.922	8.938.075.265
Beban Persediaan	D.3	32.498.000	43.820.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.249.474.724	4.348.751.276
Beban Pemeliharaan	D.5	480.833.155	904.526.940
Beban Perjalanan Dinas	D.6	699.140.365	1.035.216.149
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.641.643.980	1.713.587.905
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(55.269)	55.269
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		14.240.719.877	16.984.032.804
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(14.097.644.210)	(16.829.709.068)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		11.053.743	5.021.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	8.072.000
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		11.053.743	(3.051.000)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		11.053.743	(3.051.000)
SURPLUS/DEFISIT LO		(14.086.590.467)	(16.832.760.068)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SUPM NEGERI LADONG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
EKUITAS AWAL	E.1	37.854.142.697	39.572.029.156
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(14.086.590.467)	(16.820.671.201)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	178.781
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TNON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	178.781
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	12.894.858.170	15.102.605.961
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(1.191.732.297)	(1.717.886.459)
EKUITAS AKHIR		36.662.410.400	37.854.142.697

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis SUPM Negeri Ladong

*Dasar Hukum
Entitas dan*

SUPM Negeri Ladong didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendidik dan meluluskan SDM Kelautan dan Perikanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Berkedudukan di Jalan Laksamana Malahayati Km. 26 Aceh Besar.

*Rencana
Strategis*

- Rencana Strategis SUPM Negeri Ladong
Menuju Sentra Pengembangan SDM Perikanan bertaraf Internasional di Nanggroe Aceh Darussalam dan sekitarnya
- Visi
Menjadi sentra pengembangan SDM unggul tingkat menengah di Aceh dan sekitarnya untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat
- Misi
 - 1. Menyelenggarakan pendidikan formal perikanan secara profesional sesuai kurikulum yang berlaku;*
 - 2. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan;*
 - 3. Melakukan Pembinaan karakter siswa*
 - 4. Mengelola Sarana Prasarana Diklat*
 - 5. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat*
 - 6. menyelenggarakan unit produksi perikanan*
- Indikator Kinerja
Persentase pemenuhan Tenaga Teknis Perikanan Terdidik yang Kompeten sesuai Kebutuhan dan Prioritas Nasional dengan Proses Belajar Mengajar dan Sarana Prasarana yang memenuhi standar.
- Data Jumlah Pegawai
Jumlah Pegawai SUPM Negeri Ladong per 31 Desember 2024 berjumlah 76 orang dengan rincian sebagai berikut :

Data Pegawai SUPM Ladong

No	Jenis Pegawai	Jumlah	Ket.
1	PNS	59	
2	PPPK	1	
3	PPNPN	16	
	TOTAL	76	

- Aplikasi

Aplikasi yang digunakan oleh SUPM Ladong dalam mendukung kegiatan dan pelaporan terdiri atas beberapa aplikasi :

- a. Aplikasi e-Dalwas
- b. Aplikasi e-DJA
- c. Aplikasi e-Monev Bappenas
- d. Aplikasi SAKTI

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh SUPM Negeri Ladong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

SUPM Negeri Ladong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan SUPM Negeri Ladong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari SUPM Negeri Ladong. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor SUPM Negeri Ladong adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada SUPM Negeri Ladang adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Uang Pendidikan diakui setelah Penyetoran dilaksanakan atau Bulan bersangkutan berakhir
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban

atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan

Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlah bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan pensisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo		0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta

Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa manfaat Aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.05/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas bulan setelah tanggal pelaporan).
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, SUPM Negeri Ladong mengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Pagu senilai Rp13.709.595.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	DIPA AWAL	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	105.364.000	105.364.000
Jumlah Pendapatan	105.364.000	105.364.000
Belanja		
Belanja Pegawai	8.952.889.000	8.214.889.000
Belanja Barang	4.190.032.000	4.466.512.000
Belanja Modal	566.674.000	466.674.000
Jumlah Belanja	13.709.595.000	13.148.075.000

Realisasi
Pendapatan
Rp154.129.410

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp154.129.410,00 atau mencapai 146,28 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp105.364.000,00. Pendapatan SUPM Negeri Ladong terdiri dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan Budidaya, Pendapatan Hasil Produksi Non Litbang, Pendapatan Pengelolaan BMN dan Pendapatan Pendidikan serta Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	87.000.000	96.114.600	110,48
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya		24.975.000	100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	15.264.000	19.086.067	125,04
Pendapatan Biaya Pendidikan	3.100.000	2.900.000	93,55
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	11.053.743	100,00
Jumlah	105.364.000	154.129.410	146,28

Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami penurunan sebesar 25,61 persen dibandingkan dengan realisasi pendapatan PNPB pada TA 2023. Pendapatan disetor melalui Potongan SPM sebesar Rp16.670.324,00 dan melalui SIMPONI sebesar Rp137.459.086,00 dengan rincian sebagai berikut :

** Potongan melalui SPM :

1. Sewa Rumah Dinas Bulan Januari s/d Desember 2024 sebesar Rp16.670.321,00
2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp3,00

** Pendapatan melalui setoran SIMPONI

1. Sewa Rumah Dinas sebesar Rp2.415.746,00
2. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp24.975.000,00
3. Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp2.900.000,00 (Taruna Poltek KP Aceh)
4. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya sebesar Rp96.114.600,00
5. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp11.053.740,00

Dasar Hukum dan tarif pemotongan untuk pendapatan Sewa Rumah Dinas berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 Tanggal 16 Juli 2011 tentang Sewa Rumah Negara.

Sedangkan dasar hukum dan tarif pemotongan hasil samping pendidikan dan Pendapatan pendidikan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	96.114.600	102.720.500	-6,43
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	24.975.000	21.393.000	16,74
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	19.086.067	18.210.236	4,81
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	12.088.867	-100,00
Pendapatan Biaya Pendidikan	2.900.000	12.000.000	-75,83
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	11.053.743	5.021.000	120,15
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	35.756.100	100,00
Jumlah Pendapatan	154.129.410	207.189.703	-25,61

Pendapatan sebesar Rp11.053.740,00 merupakan pendapatan pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu atas temuan BPK pada tahun 2023 pada pegawai tugas belajar berupa Pengembalian Tunjangan Kinerja sebesar Rp878.740,00 dan Tunjangan Umum PNS sebesar Rp10.175.000 dan telah diselesaikan seluruhnya.

Realisasi Belanja
Negara
Rp13.048.987.580

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp13.048.987.580,00 atau 99,25 persen dari anggaran belanja sebesar Rp13.148.075,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	8.214.889.000	8.133.915.252	99,01
Belanja Barang	4.466.512.000	4.457.808.398	99,81
Belanja Modal	466.674.000	466.244.000	99,91
Total Belanja Kotor	13.148.075.000	13.057.967.650	99,31
Pengembalian Belanja		(8.980.070)	0
Belanja Netto	13.148.075.000	13.048.987.580	99,25

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 14,77 persen. Hal ini disebabkan berkurangnya pagu pada semua jenis belanja.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	8.126.131.182	8.949.129.005	(9,20)
Belanja Barang	4.456.612.398	6.315.495.659	(29,43)
Belanja Modal	466.244.000	45.171.000	932,18
Jumlah	13.048.987.580	15.309.795.664	(14,77)

Belanja Pegawai
Rp8.126.131.182

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.126.131.182,00 dan Rp8.949.129.005,00. Realisasi belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 9,20 persen dari Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain adanya 10 orang pegawai pindah tugas dan pegawai pensiun.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8.007.695.096	8.923.733.507	(10,27)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	126.220.156	25.765.696	100,00
Jumlah Belanja Kotor	8.133.915.252	8.949.499.203	(9,11)
Pengembalian Belanja Pegawai	(7.784.070)	(370.198)	
Jumlah Belanja	8.126.131.182	8.949.129.005	(9,20)

Belanja Barang
Rp4.456.612.398

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.456.612.398,00 dan Rp6.315.495.659,00. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 27,31 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini antara lain Biaya makan peserta didik yang berkurang, operasional kantor dan biaya pemeliharaan peralatan dan gedung serta berkurang jumlah peserta didik.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.468.953.930	2.118.230.017	(30,65)
Belanja Barang Non Operasional	1.158.275.600	1.681.039.150	(31,10)
Belanja Jasa	621.726.348	557.155.403	11,59
Belanja Pemeliharaan	479.983.155	904.526.940	(46,94)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	700.336.365	1.035.216.149	(32,35)
Belanja Barang Persediaan Konsumsi	28.533.000	27.728.000	2,90
Jumlah Belanja Kotor	4.457.808.398	6.323.895.659	(29,51)
Pengembalian Belanja	(1.196.000)	(8.400.000)	
Jumlah Belanja	4.456.612.398	6.315.495.659	(29,43)

Belanja Modal
Rp466.244.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp466.244.000,00 dan Rp45.171.000,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.674.000	15.000.000	344,49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	0	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	399.570.000	0	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	0	30.171.000	100,00
Jumlah Belanja Kotor	466.244.000	45.171.000	932,18
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	466.244.000	45.171.000	932,18

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP.

Kas Lainnya dan
setara kas Rp0

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan Pendapatan Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.3 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Persediaan
Rp12.923.000

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp12.923.000,00 dan Rp17.738.000,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31 Desember 2024	2023
Barang Konsumsi	7.489.000	16.039.000
Bahan Untuk Pemeliharaan	-	850.000
Persediaan Lainnya	5.434.000	849.000
Jumlah	12.923.000	17.738.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan telah dilakukan opname fisik dengan Berita Acara Nomor B.1178/SUPM.LD/PL.510/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024.

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki SUPM Negeri Ladong per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.720.155.000. Aset berupa Tanah tersebut terletak di Jl Laksamana Malahayati Km. 26 Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2023.

Rincian Saldo Tanah

No	KIB	Luas	Nilai
1	1	51.909 m2	3.753.775.000
2	1	101.200 m2	10.966.380.000
Jumlah			14.720.155.000

Tanah yang saat ini digunakan SUPM Negeri Ladong dengan luas total 153.109 m2 dengan rincian sebagai berikut :

- Luas tanah 51.909 m2 An. Pemerintah RI Cq. Kementerian KKP
- Luas tanah 101.200 m2 An. Pemerintah RI Cq. Kementerian KKP (Sebagian Dalam proses sertifikasi)

Seluruh Aset tanah telah tersertifikasi a.n. Pemerintah RI Cq. Kementerian KKP.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	14.720.155.000
Mutasi tambah:	
Hibah (Masuk) (103)	0
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (205)	0
Pengembangan Nilai Aset (202)	0
Mutasi kurang:	0
Koreksi Kesalahan Input IP (225)	0
Saldo per 31 Desember 2024	14.720.155.000

Rincian aset tetap Tanah disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin
Rp14.616.362.341

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp14.616.362.341,00 dan Rp14.048.938.341,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	14.048.938.341
Mutasi tambah:	
Pembelian (101)	66.674.000
Transfer Masuk (102)	500.750.000
Pengembangan Nilai Aset (202)	0
Mutasi kurang:	0
Reklasifikasi Keluar (304)	0
Saldo per 31 Desember 2024	14.616.362.341
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-13.368.785.396
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1.247.576.945

Mutasi transaksi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin berupa :

** Pembelian (101) Rp66.674.000,00

No	Uraian	Kuantitas	Nilai
1	Chest Freezer	1	27.750.000
2	Blower	1	15.000.000
3	Mesin Giling Daging	1	23.924.000
	JUMLAH	3	66.674.000

** Transfer Masuk (102) Rp500.750.000,00

No	Uraian	Kuantitas	Nilai
1	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	500.750.000
	JUMLAH	1	500.750.000

Transfer masuk Peralatan dan Mesin dari Sekretariat BPPSDM Kelautan dan Perikanan dengan Berita Acara 2159/BRSDM.4/PL.510/VII/2024 Tanggal 8 Agustus 2024

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp24.587.232.834

C.6 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp24.587.232.834,00 dan Rp24.187.662.834,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal pelaporan adalah :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	24.187.662.834
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset (202)	99.935.000
Pengembangan Melalui KDP (208)	299.635.000
Mutasi kurang:	-
Koreksi Kesalahan Input IP (225)	-
Koreksi Nilai Barang Berlebih (245)	-
Saldo per 31 Desember 2024	24.587.232.834
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(5.089.950.698)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	19.497.282.136

Mutasi transaksi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan berupa :

** Pengembangan Nilai Aset (202) Rp99.935.000,00

No	Uraian	Kuantitas	Nilai
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	99.935.000
	JUMLAH	0	99.935.000

** Pengembangan melalui KDP (208) Rp299.635.000,00

No	Uraian	Kuantitas	Nilai
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	299.635.000
	JUMLAH	0	299.635.000

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp2.746.388.770

C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.746.388.770,00 dan Rp2.746.388.770,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan tanggal pelaporan adalah :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	2.746.388.770
Mutasi tambah:	
Koreksi Kesalahan Input IP (255)	-
Pengembangan melalui KDP (208)	-
Mutasi kurang:	-
Reklasifikasi Keluar (304)	-
Saldo per 31 Desember 2024	2.746.388.770
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(1.914.608.069)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	831.780.701

Tidak ada Mutasi transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama periode sampai dengan 31 Desember 2024.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp652.890.826

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp652.890.826,00 dan Rp652.890.826,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk per 31 Desember 2024.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	652.890.826
Mutasi tambah:	
Pembelian (101)	-
Pengembangan melalui KDP (208)	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223)	-
Saldo per 31 Desember 2024	652.890.826
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(276.893.125)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	375.997.701

Tidak ada Mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya selama periode sampai dengan 31 Desember 2024.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp20.650.237.288)

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing (Rp20.650.237.288,00) dan (Rp18.507.843.308,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	14.616.362.341	13.368.785.396	1.247.576.945
2	Gedung dan Bangunan	24.587.232.834	5.089.950.698	19.497.282.136
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.746.388.770	1.914.608.069	831.780.701
4	Aset Tetap Lainnya	652.890.826	276.893.125	375.997.701
Jumlah		42.602.874.771	20.650.237.288	21.952.637.483

Aset Tak Berwujud
Rp5.098.131

C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp5.098.131,00 dan Rp5.098.131,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada SUPM Negeri Ladong berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak ada Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan. Software ini merupakan sebuah program Pendidikan yang diterima dari Pusdik KP dan sudah tidak digunakan lagi karena dalam kondisi rusak

Saldo per 31 Desember 2023	5.098.130
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap (188)	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2024	5.098.130
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2024	(5.098.130)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software Komputer	5.098.130
Jumlah	5.098.130

*Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp99.935.000*

C.11 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Akun dana tersebut timbul dikarenakan adanya suatu pekerjaan yang melewati batas-batas pengajuan SPM ke KPPN dan ditampung dalam rekening negara atau RPATA. RPATA digunakan untuk menampung dana penyelesaian pekerjaan yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran. Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga telah diselesaikan dengan BAST Pekerjaan Tanggal 30 Desember 2024 dan diajukan pembayaran RPATA pada tanggal 2 Januari 2025 senilai Rp99.935.000,00

*Aset Lain-Lain
Rp409.160.800*

C.12 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp409.160.800,00 dan Rp885.410.800,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Barang dalam kondisi rusak tersebut dalam tahap progres pengajuan izin ke Pusat Pendidikan KP melalui surat Nomor B.848/BRSDM-SUPM.LDG/PL.420/VII/2020 Tanggal 3 Juli 2020 dengan Nilai Total barang yang akan dihapuskan sebesar Rp2.155.137.298 (terlampir).

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	885.410.800
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya (188)	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN (yang dihentikan) (391)	(476.250.000)
Saldo per 31 Desember 2024	409.160.800
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(409.160.800)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp414.258.930)*

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing (Rp414.258.930,00) dan (Rp890.508.930,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	5.098.130	5.098.130	0
Aset Lain-lain	409.160.800	409.160.800	0
Jumlah	414.258.930	414.258.930	0

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp123.240.083*

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp123.240.083,00 dan Rp22.786.237,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Kepada Pihak Ketiga berupa Pembayaran Termin ke 2 Pekerjaan Pemasangan Plastik HDPE Tambak yang mekanisme Pembayaranannya menggunakan RPATA senilai Rp99.935.000,00, Tagihan Internet dan Telepon pemakaian Desember 2024 senilai Rp5.322.183,00 dan Tagihan PLN Pemakaian Bulan Desember 2024 senilai Rp17.982.900,00.

*Uang Muka dari KPPN
Rp0*

C.15 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp30,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0*

C.16 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Ekuitas
Rp36.662.410.400*

C.17 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp36.662.410.400,00 dan Rp37.854.142.697,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB

Rp143.075.667

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp82.426.738,00 dan Rp109.770.413,00.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	96.114.600	102.720.500	(6,43)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	24.975.000	21.393.000	100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19.086.067	18.210.236	4,81
Pendapatan Biaya Pendidikan	2.900.000	12.000.000	(75,83)
Jumlah	143.075.667	154.323.736	(7,29)

Pendapatan Pengelolaan BMN merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan Pengelolaan BMN dan Pendapatan Pendidikan merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Tupoksi SUPM Negeri Ladong.

Beban Pegawai

Rp8.137.184.922

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.137.184.922,00 dan Rp8.938.075.265,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	4.743.213.720	5.231.497.663	(9,33)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	61.602.344	25.765.696	100,00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	3.332.368.858	3.680.811.906	(9,47)
Jumlah	8.137.184.922	8.938.075.265	(8,96)

Beban Persediaan
Rp32.498.000

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp32.498.000,00 dan Rp43.820.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	25.083.000	43.400.000	(42,21)
Beban Persediaan Bahan Baku	0	420.000	(100,00)
Beban Persediaan Lainnya	7.415.000	-	-
Jumlah Beban Persediaan	32.498.000	43.820.000	(25,84)

Beban Barang dan Jasa
Rp3.249.474.724

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.249.474.724,00 dan Rp4.348.751.276,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Belanja Operasional	1.468.953.930	2.109.830.017	-30,38
Beban Belanja Non Operasional	1.158.275.600	1.681.039.150	-31,10
Beban Jasa	622.245.194	557.882.109	11,54
Jumlah	3.249.474.724	4.348.751.276	-25,28

Beban
Pemeliharaan
Rp480.833.155

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp480.833.155,00 dan Rp904.526.940,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	172.046.000	391.696.000	(56,08)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	268.053.206	375.640.040	(28,64)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	38.595.000	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jaringan	39.883.949	98.595.900	(59,55)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	850.000	-	
Jumlah	480.833.155	904.526.940	(46,84)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp699.140.365

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp699.140.365,00 dan Rp1.035.216.149,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	506.110.365	755.556.149	-33,01
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	193.030.000	279.660.000	100,00
Jumlah	699.140.365	1.035.216.149	-32,46

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp1.641.643.980

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.41.643.980,00 dan Rp1.713.587.905,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 September 2024 dan 30 September 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30 September 2024	30 September 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	345.436.314	389.101.746	(11,22)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	371.675.895	371.675.895	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	94.584.831	94.584.831	-
Beban Penyusutan Irigasi	13.681.076	13.681.076	-
Beban Penyusutan Jaringan	6.445.352	6.445.352	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.771.375	-	-
Jumlah Penyusutan	835.594.843	875.488.900	(4,56)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	835.594.843	875.488.900	(4,56)

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
(Rp55.269)

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp55.269,00) dan Rp55.269,00. Beban penyisihan piutang tak tertagih adalah perkiraan manajemen mengenai jumlah piutang yang tidak akan dibayar oleh pelanggan. Ini juga dikenal sebagai penyisihan piutang tak tertagih atau cadangan utang tak tertagih. Beban Penyisihan Tak Tertagih per 31 Desember 2024 juga merupakan pasangan Jurnal atas Piutang Lainnya berupa Temuan BPK Tahun 2023 atas belanja pegawai.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	(55.269)	55.269	100,00
	-	-	-
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(55.269)	55.269	(200,00)

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp11.053.743

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	#DIV/0!
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	#DIV/0!
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	11.053.743	5.021.000	120,15
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11.053.743	5.021.000	120,15
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	
Beban Persediaan Rusak/Usang	0	8.072.000	(100,00)
Jumlah Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	8.072.000	(100,00)
Jumlah Surplus/(Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11.053.743	- 3.051.000	(462,30)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	11.053.743	(3.051.000)	(462,30)

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp11.053.743 terdiri atas :

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp11.053.743 berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai (Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Umum PNS) Bulan Januari sd Desember 2023

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp37.854.142.697

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp37.854.142.697,00 dan Rp39.572.029.156,00.

Defisit LO
Rp14.086.590.467

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.086.590.467,00 dan Rp6.820.671.201,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai
Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Tidak Ada Transaksi

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Tidak Ada Transaksi

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Tidak Ada Transaksi

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Tidak Ada Transaksi.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Tidak Ada Transaksi

Lain-lain Rp0,00

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Nilai Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp178.781,00

Transaksi Antar
Entitas
Rp12.894.858.170

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp12.894.858.170,00 dan Rp15.102.605.961,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	13.048.987.580
Diterima dari Entitas Lain	(154.129.410)
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Jumlah	12.894.858.170

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp13.048.987.580,00 sedangkan DDEL sebesar Rp154.129.410,00

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Tidak Ada Transaksi

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Tidak Ada Transaksi

Ekuitas Akhir
Rp36.662.410.400

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp36.662.410.400,00 dan Rp37.854.142.697,00

G. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

G.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

-

G.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Tindak lanjut atas temuan BPK Tahun 2023 telah diselesaikan secara keseluruhan yang meliputi :
 - a. Pengembalian Kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja PNS Tubel sebesar Rp878.740,00 telah disetor ke kas negara pada tanggal 7 Februari 2024 dengan NTPN 65CAF3CIFK4PBJKA.
 - b. Pengembalian Kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu atas pembayaran tunjangan umum PNS pegawai Tubel sebesar Rp10.175.000,00 telah disetor ke kas negara pada tanggal 7 Februari 2024 dengan NTPN 155291JNFV28KIJ9.
- Untuk Pengembalian Belanja Tunjangan Umum Tahun berjalan pegawai Tubel sebesar Rp5.550.000,00 dan Belanja Tunjangan Fungsional Tahun berjalan PNS Tubel sebesar Rp327.000,00 telah dilakukan melalui pemotongan SPM Gaji masing-masing pegawai tubel.

F. PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI OUTPUT

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong antara lain sebagai berikut :

**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kementerian Negara/Lembaga : Kelautan dan Perikanan (032)
Unit Organisasi : Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP (12)
Satuan Kerja : Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong (427551)
Fungsi : Ekonomi (04)
Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (04.03)
Program : Program Dukungan Manajemen (WA)
Lokasi : Aceh Besar

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Ekonomi								
03	Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan								
WA	Program Dukungan Manajemen								
2378	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan								
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	10.059.028.000	9.970.444.488	99,12					
962	Layanan Umum	56.307.000	55.244.560	98,11	1	1	Layanan	100,00	Selesai 100%
994	Layanan Perkantoran	10.002.721.000	9.915.199.928	99,13	1	1	Layanan	100,00	Selesai 100%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	119.443.000	119.166.774	99,77					
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	30.000.000	29.984.172	99,95	1	1	Layanan	100,00	Selesai 100%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	25.000.000	24.858.249	99,43	1	1	Layanan	100,00	Selesai 100%
955	Layanan Manajemen Keuangan	64.443.000	64.324.353	99,82	1	1	Layanan	100,00	Selesai 100%
	Sub Total	10.178.471.000	10.089.611.262	99,13					
	Penyesuaian (Revisi DIPA / Pengembalian Belanja/dll*)								
	Total	10.178.471.000	10.089.611.262	99,13					

**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kementerian Negara/Lembaga : Kelautan dan Perikanan (032)
Unit Organisasi : Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP (12)
Satuan Kerja : Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong (427551)
Fungsi : Pendidikan (10)
Sub Fungsi : Pendidikan Tinggi (10.06)
Program : Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (DL)
Lokasi : Aceh Besar

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Pendidikan								
06	Pendidikan Tinggi								
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi								
2376	Pendidikan Kelautan dan Perikanan								
RAA	Sarana Bidang Pendidikan	66.674.000	66.674.000						
001	Peralatan dan Mesin Pendidikan KP	66.674.000	66.674.000	100,00	2	2	Unit	100,00	Selesai 100%
RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	400.000.000	399.570.000						
001	Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang ditingkatkan kapasitasnya	400.000.000	399.570.000	99,89	1	1	Unit	100,00	Selesai 100%
SAC	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	2.502.930.000	2.496.291.388	99,73					
001	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	2.502.930.000	2.496.291.388	99,73	111	111	Orang	100,00	Selesai 100%
	Sub Total	2.969.604.000	2.962.535.388	99,76					
	Penyesuaian (Revisi DIPA / Pengembalian Belanja/dll*)								
	Total	2.969.604.000	2.962.535.388	99,76					

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (03) dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional – Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, yang tersebar di 1 Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp2.969.604.000 dan realisasi sebesar Rp2.962.535.388 dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga: Kelautan dan Perikanan

Unit Organisasi : Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Satker : Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong

Prgogram/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Sarana Bidang Pendidikan	66.674.000	66.674.000	100,00	Unit	2	2	100,00
Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	400.000.000	399.570.000	99,89	Unit	1	1	100,00
Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	2.502.930.000	2.496.291.388	99,73	Orang	111	111	100,00
Jumlah	2.969.604.000	2.962.535.388					